

Pengaruh Uang Elektronik (*E-Money*), Uang Kartal Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2022-2024

Sri Adelya Putri¹, Hilmiatus Sahla²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Asahan
e-mail: putrisriadelya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh uang elektronik (e-money), uang kartal, dan pengeluaran pemerintah terhadap inflasi di Indonesia periode 2022–2024 baik secara parsial maupun simultan. Perkembangan sistem pembayaran digital melalui uang elektronik, peredaran uang kartal, serta kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap inflasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk time series bulanan periode 2022–2024 sebanyak 36 observasi yang diperoleh dari publikasi resmi Bank Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi EViews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang elektronik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi dengan koefisien regresi sebesar $-0,000549$ dan nilai probabilitas $0,0068 < 0,05$. Uang kartal memiliki koefisien sebesar $0,00000648$ dengan nilai probabilitas $0,0949 > 0,05$ sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi dengan koefisien sebesar $-0,00000542$ dan nilai probabilitas $0,0227 < 0,05$. Secara simultan, uang elektronik, uang kartal, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,667015$ menunjukkan bahwa 66,70% variasi inflasi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 33,30% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia periode 2022–2024 dipengaruhi oleh kombinasi faktor moneter dan fiskal. Uang elektronik dan pengeluaran pemerintah terbukti berkontribusi dalam menekan inflasi, sedangkan uang kartal belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan inflasi.

Kata Kunci : Inflasi, Uang Elektronik (E-Money), Uang Kartal, Pengeluaran Pemerintah, Regresi Linier Berganda.

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang sangat penting karena mencerminkan tingkat kestabilan harga dalam suatu perekonomian. Inflasi yang terkendali dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, mendorong investasi, serta menjaga daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan berfluktuasi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan biaya produksi, dan menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi, baik kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral maupun kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Inflasi pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain

jumlah uang beredar, perkembangan sistem pembayaran, serta pengeluaran pemerintah sebagai instrumen fiskal.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di sektor keuangan telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pembayaran, salah satunya melalui peningkatan penggunaan uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik hadir sebagai instrumen pembayaran non-tunai yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan transaksi. Meningkatnya penggunaan *e-money* berpotensi memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat serta mempercepat perputaran uang dalam perekonomian. Berdasarkan teori kuantitas uang, peningkatan kecepatan peredaran uang (*velocity of money*) dapat mendorong kenaikan tingkat harga apabila tidak diimbangi dengan peningkatan output barang dan jasa (Boediono, 2018; 45).

Dengan demikian, perkembangan *e-money* secara tidak langsung dapat memberikan tekanan terhadap inflasi melalui peningkatan permintaan agregat.

Di sisi lain, uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam masih memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi, khususnya untuk transaksi bernilai kecil dan di wilayah yang akses sistem pembayaran digitalnya belum merata. Jumlah uang kartal yang beredar memiliki hubungan erat dengan inflasi sebagaimana dijelaskan dalam teori moneter klasik, yang menyatakan bahwa kenaikan jumlah uang beredar akan menyebabkan kenaikan tingkat harga apabila output bersifat relatif tetap (Hasoloan, 2014; 72). Data Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada periode tertentu, seperti menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun, peredaran uang kartal cenderung meningkat dan diikuti oleh tekanan inflasi yang bersifat musiman. Kondisi ini mengindikasikan bahwa uang kartal masih menjadi salah satu faktor yang relevan dalam menjelaskan dinamika inflasi.

Selain faktor moneter, inflasi juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, khususnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Namun, apabila peningkatan pengeluaran tersebut tidak diimbangi oleh kapasitas produksi yang memadai, maka akan menimbulkan tekanan. Pengeluaran pemerintah yang bersumber dari belanja rutin maupun belanja pembangunan berpotensi meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap tingkat harga.

Tabel 1.1 Uang Elektronik (*E-Money*), Uang Kartal, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi Indonesia Tahun 2015-2024

Tahun	Uang Elektronik (Milyar Rp)	Uang Kartal (Milyar Rp)	Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rp)	Inflasi (Persen)
2015	738	469.534	1.806.515	3,35
2016	982	508.124	1.864.275	3,02
2017	2.421	586.576	2.007.352	3,61
2018	4.033	625.370	2.213.118	3,13
2019	6.143	654.764	2.309.287	2,72
2020	7.893	760.112	2.595.481	1,68
2021	11.112	831.234	2.786.411	1,87
2022	10.606	897.799	3.096.263	5,51
2023	12.389	975.928	3.121.217	2,61
2024	14.205	1.062.795	3.359.767	1,57

Sumber : Bank Indonesia, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, perkembangan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan peningkatan, namun tidak selalu diikuti oleh kenaikan inflasi. Pada tahun 2015, nilai transaksi uang elektronik tercatat sebesar Rp738 miliar dengan tingkat inflasi sebesar 3,35 persen. Pada tahun 2016 terdapat fenomena dimana nilai transaksi e-

money meningkat namun tidak diikuti dengan peningkatan inflasi. Begitu pula pada tahun 2019, nilai transaksi e-money meningkat mencapai Rp6.143 miliar, namun inflasi justru menurun menjadi 2,72 persen. Sedangkan pada tahun 2022, meskipun nilai transaksi e-money sedikit menurun menjadi Rp10.606 miliar, inflasi justru naik menjadi 5,51 persen. Begitu pula pada tahun 2024, transaksi e-money kembali meningkat hingga Rp14.205 miliar, namun inflasi kembali menurun menjadi 1,57 persen. Fenomena ini bertentangan dengan teori yakni menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan uang elektronik tidak selalu berjalan searah dengan pergerakan inflasi.

Dilihat dari perkembangan uang kartal, jumlah uang kartal yang beredar selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten. Pada tahun 2015, uang kartal tercatat sebesar Rp469.534 miliar dengan inflasi sebesar 3,35 persen. Nilai uang kartal terus meningkat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menjadi Rp654.764 miliar, sementara inflasi justru mengalami penurunan pada tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 hingga mencapai 1,68 persen. Fenomena serupa juga terjadi pada tahun 2023 hingga 2024, dimana uang kartal terus meningkat hingga Rp1.062.795 miliar, namun inflasi mengalami penurunan menjadi 1,57 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan uang kartal tidak selalu secara langsung diikuti oleh peningkatan inflasi yang mana bertentangan dengan teori.

Sementara itu, pengeluaran pemerintah selama periode 2015–2024 juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, pengeluaran pemerintah tercatat sebesar Rp1.806.515 miliar dengan inflasi sebesar 3,35 persen. Fenomena terjadi pada tahun 2016 hingga 2020, dimana pengeluaran pemerintah meningkat menjadi Rp2.309.287 miliar, sementara inflasi justru cenderung mengalami penurunan berturut-turut hingga mencapai 1,68 persen. Begitu pula, pada tahun 2023 dan 2024, meskipun pengeluaran pemerintah terus meningkat hingga Rp3.359.767 miliar, inflasi justru menurun menjadi 1,57 persen. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan data empiris dengan teori yang ada yakni peningkatan pengeluaran pemerintah tidak selalu bergerak searah dengan inflasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menganalisis pengaruh uang elektronik (e-money), uang kartal, dan pengeluaran pemerintah terhadap inflasi di Indonesia periode 2022–2024. Penelitian menggunakan data sekunder berupa data runtut waktu (*time series*) bulanan selama periode Januari 2022 hingga Desember 2024 sehingga diperoleh sebanyak 36 observasi. Data diperoleh dari publikasi resmi Bank Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah inflasi (Y), sedangkan variabel independennya terdiri atas uang elektronik (*e-money*) (X1), uang kartal (X2), dan pengeluaran pemerintah (X3). Data inflasi diukur menggunakan tingkat inflasi bulanan, sementara data uang elektronik, uang kartal, dan pengeluaran pemerintah dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengumpulkan data statistik yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia serta berbagai literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews 10. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Inflasi
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

- X_1 = Uang Elektronik (E-Money)
- X_2 = Uang Kartal
- X_3 = Pengeluaran Pemerintah
- e = Error term

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk memastikan model memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Selanjutnya dilakukan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen maupun pengaruh secara bersama-sama terhadap inflasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

Analisis Deskriptif Nilai Variabel-Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk *time series* yang diperoleh dari Bank Indonesia yaitu berupa data bulanan Uang Elektronik (*E-Money*), Uang Kartal, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia tahun 2022 – 2024. Data yang digunakan sebanyak 36 sampel dan diolah menggunakan *Eviews 10*.

Variabel dari penelitian ini data Uang Elektronik (*E-Money*), Uang Kartal dan Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel bebas serta Inflasi sebagai variabel terikat. Statistik deskriptif variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif Variabel

Sample: 2022M01 2024M12

	Y_ INFLASI	X1_ UANGELEKTRONIK	X2_ UANGKARTAL	X3_ PENGPEMERINTAH
Mean	3.398333	11584.78	882934.7	3192416.
Median	3.025000	11444.69	872556.4	3131826.
Maximum	5.950000	14205.37	1062795.	3531648.
Minimum	1.550000	9363.950	765015.1	3071752.
Std. Dev.	1.325882	1376.735	69732.34	136526.3
Skewness	0.491199	0.034808	0.449815	1.116704
Kurtosis	1.964119	1.893677	2.529649	2.997209
Jarque-Bera	3.057233	1.843195	1.545849	7.482174
Probability	0.216836	0.397883	0.461661	0.023728
Sum	122.3400	417051.9	31785648	1.15E+08
Sum Sq. Dev.	61.52870	66338942	1.70E+11	6.52E+11
Observations	36	36	36	36

Sumber: Hasil data diolah dengan Eviews 10 (2026)

Tabel diatas menunjukkan bahwa statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian. Berikut adalah rinciannya :

1. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel Inflasi (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 1.550000, nilai maksimum sebesar 5.950000, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 3.398333 dan standar deviasi (*standart deviation*) sebesar 1.325882.
2. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel Uang Elektronik (*E-Money*) (X_1) menunjukkan nilai minimum sebesar 9363.950, nilai maksimum sebesar 14205.37, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 11584.78 dan standar deviasi (*standart deviation*) sebesar 1376.735.
3. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel Uang Kartal (X_2) menunjukkan nilai minimum sebesar 765015.1, nilai maksimum sebesar 1062795, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 882934.7 dan standar deviasi (*standart deviation*) sebesar 69732.34.
4. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel Pengeluaran Pemerintah (X_3) menunjukkan nilai minimum sebesar 3071752, nilai maksimum sebesar 3531648, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 3192416 dan standar deviasi (*standart deviation*) sebesar 136526.3.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap seluruh penelitian menunjukkan nilai standar deviasi (*standart deviation*) lebih kecil dari nilai *mean* yang artinya penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen yang merupakan penggabungan antara data *cross section* (antar tempat) dan *time series* (runtut waktu). Berikut adalah hasil dari estimasi analisis regresi data panel :

Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y_INFLASI

Method: Least Squares

Sample: 2022M01 2024M12

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.35709	4.476070	4.771393	0.0000
X1_UANGELEKTRONIK	-0.000549	0.000190	-2.892891	0.0068
X2_UANGKARTAL	6.487517	3.76E-06	1.720958	0.0949
X3_PENGPEMERINTAH	-5.422625	2.26E-06	-2.394740	0.0227
R-squared	0.667015	Mean dependent var		3.398333
Adjusted R-squared	0.635797	S.D. dependent var		1.325882
S.E. of regression	0.800159	Akaike info criterion		2.496427
Sum squared resid	20.48815	Schwarz criterion		2.672374
Log likelihood	-40.93569	Hannan-Quinn criter.		2.557837
F-statistic	21.36678	Durbin-Watson stat		0.468361
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil data diolah dengan Eviews 10 (2026)

$$Y = 21,35709 - 0,000549 X_1 + 6,487517 X_2 - 5,422625 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen sebagai berikut :

1. Nilai koefisien yang didapat dari analisis regresi data panel diatas sebesar 21,35709, mengartikan bahwa ketika nilai koefisien seluruh variabel bebas (Uang Elektronik, Uang Kartal dan Pengeluaran Pemerintah) sama dengan nol maka variabel terikat (Inflasi) bernilai 21,35709.
2. Variabel Uang Elektronik (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar $-0,000549$, artinya apabila terjadi peningkatan pada variabel Uang Elektronik sebesar satu satuan maka variabel Inflasi akan menurun sebesar 0,000549.
3. Variabel Uang Kartal (X_2) memiliki nilai koefisien sebesar 6,487517, artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel Uang Kartal sebesar satu satuan maka variabel Inflasi akan meningkat sebesar 6,487517.
4. Variabel Pengeluaran Pemerintah (X_3) memiliki nilai koefisien sebesar $-5,422625$, artinya apabila terjadi peningkatan pada variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar satu satuan maka variabel Inflasi akan menurun sebesar 5,422625.

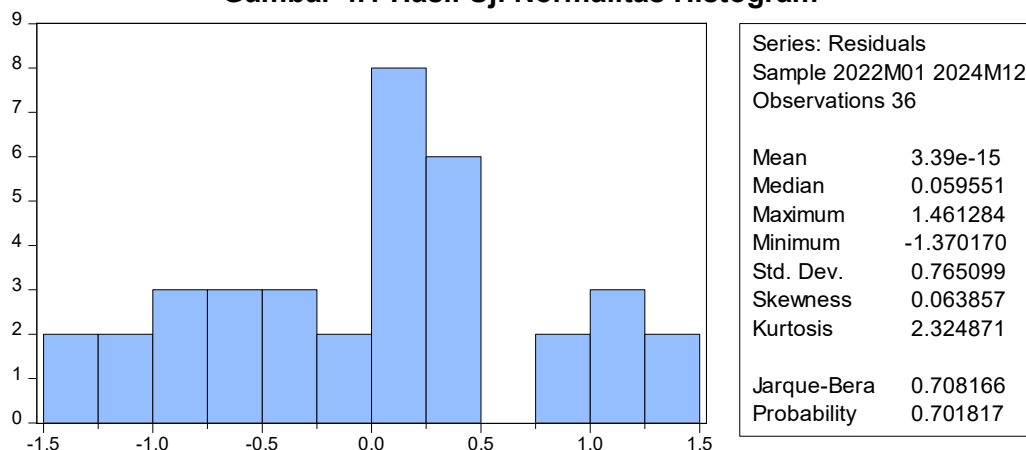
Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal, terbebas dari gejala multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak dengan melihat nilai probabilitas *Jarque-Berra* (JB) (Ghozali dan Ratmono, 2020;56).

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram



Sumber: Hasil data diolah dengan Eviews 10 (2026)

Gambar 4.1 menunjukkan hasil uji normalitas di mana probabilitas *Jarque-Berra* sebesar 0,701817 lebih besar dari 0.05. Maka berdasarkan uji normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas melakukan pengujian berdasarkan korelasi antar variabel bebas. Apabila nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,8 maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas dan apabila nilai koefisien korelasi setiap variabel independen kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali dan Ratmono, 2020; 56).

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Sample: 2022M01 2024M12
Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	20.03520	1126.532	NA
X1_UANGELEKTRONIK	3.606682	275.9023	3.737004
X2_UANGKARTAL	1.415671	624.3023	3.763103
X3_PENGPEMERINTAH	5.127465	2943.491	5.224570

Sumber: Hasil data diolah dengan Eviews 10 (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas, dapat terlihat bahwa nilai Centered VIF < 10, artinya model atau data dalam penelitian ini tidak saling mempengaruhi atau tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali dan Ratmono (2020;56) uji heteroskedastisitas ialah uji yang digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam uji ini menggunakan uji *Breusch-Pagan* untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	4.309751	Prob. F(3,32)	0.1161
Obs*R-squared	10.35969	Prob. Chi-Square(3)	0.1571
Scaled explained SS	5.422320	Prob. Chi-Square(3)	0.1434

Sumber: Hasil data diolah dengan Eviews 10 (2026)

Berdasarkan tabel 4.4, nilai probabilitas *Chi-squares* 0.1571 lebih besar dari $\alpha = 0.05$, sehingga varians homoskedastik diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi (Sahir, 2021;71).

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	17.73806	Prob. F(2,30)	0.0823
Obs*R-squared	19.50544	Prob. Chi-Square(2)	0.0581

Sumber: Hasil data diolah dengan Eviews 10 (2026)

Berdasarkan tabel 4.5, diperoleh nilai probabilitas $\text{Obs} \cdot R^2$ yakni 0,0581 lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah tidak terdapat masalah autokorelasi pada penelitian ini.

Uji Hipotesis**Uji Secara Parsial (Uji t)**

Uji parsial atau uji t pada dasarnya melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu (Ghozali dan Ratmono, 2020; 56). Uji ini dilaksanakan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , t_{tabel} didapat dengan melihat tabel distribusi t pada $df = n$ (jumlah sampel) – k (jumlah variabel bebas) = $36 - 3 = 33$, maka $t_{tabel} = 2,03452$.

Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: Y_INFLASI

Method: Least Squares

Sample: 2022M01 2024M12

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.35709	4.476070	4.771393	0.0000
X1_UANGELEKTRONIK	-0.000549	0.000190	-2.892891	0.0068
X2_UANGKARTAL	6.487517	3.76E-06	1.720958	0.0949
X3_PENGPEMERINTAH	-5.422625	2.26E-06	-2.394740	0.0227

Sumber: Hasil data diolah dengan EvIEWS 10 (2026)

Uraian hasil pengujian parsial (uji-t) pada setiap variabel bebas, yaitu:

1. Nilai $-t_{hitung}$ (-2,892891) < $-t_{tabel}$ (-2,03452) dan nilai probabilitas ($0,0068 < 0,05$) sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya secara parsial Uang Elektronik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.
2. Nilai t_{hitung} (1,720958) < t_{tabel} (2,03452) dan nilai probabilitas ($0,0949 > 0,05$) sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya secara parsial Uang Kartal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.
3. Nilai $-t_{hitung}$ (-2,394740) < $-t_{tabel}$ (-2,03452) dan nilai probabilitas ($0,0227 < 0,05$) sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya secara parsial Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.

Diantara ketiga variabel bebas dalam penelitian ini Uang Elektronik paling dominan mempengaruhi Inflasi karena nilai $-t_{hitung}$ (-2,892891) dengan tingkat probabilitas ($0,0068 < 0,05$).

Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan atau biasa disebut uji F adalah uji yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (variabel dependen) secara serentak atau bersama-sama pada tingkat 5% (Ghozali dan Ratmono, 2020;56). Dengan df (N_2) = $n - k - 1 = 36 - 4 - 1 = 31$ (df untuk penyebut) dan df (N_1) = $k - 1 = 3$ (df untuk pembilang) maka $F_{tabel} = 2,91$.

Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.667015	Mean dependent var	3.398333
Adjusted R-squared	0.635797	S.D. dependent var	1.325882
S.E. of regression	0.800159	Akaike info criterion	2.496427
Sum squared resid	20.48815	Schwarz criterion	2.672374
Log likelihood	-40.93569	Hannan-Quinn criter.	2.557837
F-statistic	21.36678	Durbin-Watson stat	0.468361
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil data diolah dengan EvIEWS 10 (2026)

Berdasarkan hasil *output* statistik di atas, maka hasil uji simultan menjelaskan bahwa nilai $F_{hitung} (21,36678) > F_{tabel} (2,91)$ dan nilai probabilitas ($0.000000 < 0,05$) sehingga diputuskan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, artinya Uang Elektronik, Uang Kartal dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur seberapa baik kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan (Ghozali dan Ratmono, 2020;56).

Tabel 4. 8 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.667015	Mean dependent var	3.398333
Adjusted R-squared	0.635797	S.D. dependent var	1.325882
S.E. of regression	0.800159	Akaike info criterion	2.496427
Sum squared resid	20.48815	Schwarz criterion	2.672374
Log likelihood	-40.93569	Hannan-Quinn criter.	2.557837
F-statistic	21.36678	Durbin-Watson stat	0.468361
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil data diolah dengan Eviews 10 (2026)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, diperoleh nilai *R Square* yaitu 0,667015, artinya variabel bebas yang terdiri dari Uang Elektronik, Uang Kartal dan Pengeluaran Pemerintah mampu menjelaskan Inflasi sebesar 66,70%, sedangkan sisanya 33,30% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Uang Elektronik Terhadap Inflasi di Indonesia

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini melalui uji parsial (Uji-t), Nilai $t_{hitung} (-2,892891) < -t_{tabel} (-2,03452)$ dan nilai probabilitas ($0,0068 < 0,05$) sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya secara parsial Uang Elektronik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.

Menurut Hasoloan (2014; 75) peningkatan penggunaan e-money dapat mempercepat peredaran uang sehingga berpotensi meningkatkan inflasi. Namun, Igamo dan Falianty (2018) menjelaskan bahwa uang elektronik lebih berfungsi sebagai pengganti uang tunai, bukan sebagai penambah jumlah uang beredar. Penggunaan e-money membuat transaksi menjadi lebih efisien, mudah diawasi, dan berbiaya lebih rendah. Selain itu, sistem pembayaran non-tunai juga dapat membantu menjaga stabilitas harga. Dengan demikian, peningkatan transaksi e-money lebih mencerminkan peralihan metode pembayaran dari tunai ke non-tunai daripada peningkatan daya beli masyarakat. Kondisi ini menyebabkan penggunaan e-money memiliki hubungan negatif dengan inflasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani dan Hilmawan (2024) juga menemukan bahwa volume uang elektronik berpengaruh negatif terhadap inflasi di Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin berkembangnya penggunaan instrumen pembayaran digital dapat membantu terciptanya sistem transaksi yang lebih efisien sehingga tekanan inflasi cenderung menurun.

Temuan koefisien negatif perlu dipahami dalam konteks fungsi uang elektronik sebagai instrumen pembayaran, bukan sebagai bentuk penciptaan uang baru. Saldo yang digunakan untuk transaksi pada dasarnya berasal dari dana yang sebelumnya telah berada dalam sistem

perbankan atau dimiliki masyarakat dalam bentuk lain. Ketika masyarakat memindahkan sebagian penggunaan uang tunai ke instrumen digital, yang berubah terutama adalah media, kecepatan, dan tata cara pembayaran. Oleh sebab itu, peningkatan nilai transaksi uang elektronik tidak secara otomatis meningkatkan kemampuan beli agregat. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan Igamo dan Falianty (2018) bahwa perluasan pembayaran non-tunai dapat berjalan bersamaan dengan peningkatan efisiensi sistem keuangan tanpa selalu menimbulkan tekanan harga yang lebih tinggi.

Dari sisi mekanisme transaksi, uang elektronik dapat menekan biaya pencarian, biaya administrasi, dan waktu penyelesaian pembayaran. Efisiensi tersebut memberikan manfaat bagi konsumen maupun pelaku usaha karena transaksi dapat dilakukan dengan cepat, tercatat, dan relatif mudah ditelusuri. Ketika biaya transaksi menurun, sebagian biaya operasional yang sebelumnya dapat diteruskan ke harga jual berpotensi berkurang. Dalam keadaan demikian, digitalisasi pembayaran bukan hanya memudahkan konsumsi, tetapi juga dapat memperbaiki efisiensi distribusi dan pengelolaan usaha. Lintang Sari dkk. (2018) menjelaskan bahwa instrumen pembayaran non-tunai memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi dan transmisi kebijakan moneter, sehingga dampaknya terhadap inflasi bergantung pada bagaimana instrumen tersebut digunakan dalam sistem ekonomi.

Hubungan negatif antara uang elektronik dan inflasi juga dapat dijelaskan melalui peningkatan transparansi transaksi. Pembayaran digital meninggalkan catatan yang lebih sistematis dibandingkan transaksi tunai, sehingga pelaku usaha dapat mengelola persediaan, arus kas, dan pola permintaan secara lebih tepat. Informasi yang lebih baik membantu usaha mengurangi kelebihan persediaan, keterlambatan pasokan, dan biaya pengelolaan kas. Pada tingkat agregat, proses tersebut dapat mendukung kelancaran penawaran barang dan jasa. Dengan demikian, pertumbuhan uang elektronik dapat berasosiasi dengan inflasi yang lebih rendah apabila digitalisasi terutama meningkatkan produktivitas dan efisiensi, bukan semata-mata meningkatkan konsumsi masyarakat.

Hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa teori kuantitas uang perlu diterapkan secara hati-hati pada perkembangan sistem pembayaran digital. Persamaan pertukaran menghubungkan jumlah uang, kecepatan peredaran uang, tingkat harga, dan output. Namun, peningkatan aktivitas uang elektronik tidak selalu sama dengan kenaikan jumlah uang beredar karena satu rupiah dapat berpindah media dari tunai ke digital tanpa menambah total likuiditas. Selain itu, peningkatan kecepatan transaksi dapat diimbangi oleh pertumbuhan output, perbaikan distribusi, atau kebijakan moneter yang menjaga permintaan agregat. Oleh karena itu, pengaruh akhir uang elektronik terhadap inflasi ditentukan oleh interaksi antara likuiditas, kapasitas produksi, perilaku konsumsi, dan respons kebijakan.

Secara statistik, koefisien negatif dan nilai probabilitas 0,0068 menunjukkan adanya hubungan yang kuat pada tingkat signifikansi lima persen dalam sampel penelitian. Meskipun demikian, besarnya koefisien harus dibaca sesuai satuan data, yaitu miliar rupiah untuk variabel uang elektronik dan persen untuk inflasi. Interpretasi yang tepat adalah bahwa perubahan transaksi uang elektronik berkaitan dengan perubahan inflasi setelah pengaruh uang kartal dan pengeluaran pemerintah dikendalikan. Koefisien tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat, karena inflasi yang rendah juga dapat mendorong peningkatan transaksi digital melalui membaiknya kepastian ekonomi dan aktivitas konsumsi.

Periode 2022–2024 merupakan periode yang memperlihatkan perubahan inflasi sekaligus pertumbuhan penggunaan pembayaran digital. Pada sampel penelitian, nilai uang elektronik meningkat, sedangkan inflasi bergerak dari tingkat yang relatif tinggi menuju tingkat yang lebih rendah. Pola tersebut mendukung arah koefisien negatif, tetapi tidak berarti seluruh penurunan inflasi berasal dari uang elektronik. Harga pangan, energi, nilai tukar, suku bunga, kondisi pasokan, dan kebijakan harga pemerintah tetap memiliki peranan. Halim (2024) juga menempatkan nilai transaksi uang elektronik bersama variabel moneter lainnya dalam

menjelaskan inflasi, yang menunjukkan bahwa dampak digitalisasi sebaiknya dianalisis sebagai bagian dari sistem yang lebih luas.

Dari perspektif kebijakan, hasil ini mendukung pengembangan sistem pembayaran digital yang aman, efisien, terjangkau, dan inklusif. Perluasan penggunaan uang elektronik sebaiknya diikuti perlindungan konsumen, penguatan keamanan data, interoperabilitas antarsistem, serta peningkatan literasi keuangan. Kebijakan tersebut penting agar manfaat efisiensi tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat yang telah memiliki akses teknologi, tetapi juga menjangkau usaha mikro dan wilayah dengan infrastruktur digital yang terbatas. Digitalisasi yang inklusif dapat memperluas pasar, menurunkan biaya transaksi, dan memperbaiki pencatatan usaha tanpa menciptakan eksklusi baru.

Temuan penelitian juga memberikan implikasi bagi pelaku usaha. Penerimaan pembayaran melalui uang elektronik dapat digunakan sebagai bagian dari pengelolaan usaha yang lebih terukur, misalnya melalui pencatatan penjualan, analisis waktu transaksi, pengendalian persediaan, dan evaluasi pola pembelian pelanggan. Apabila data transaksi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, pelaku usaha memiliki ruang lebih besar untuk menjaga harga tetap kompetitif. Dengan demikian, hubungan negatif terhadap inflasi tidak hanya dapat dijelaskan dari sisi konsumen, tetapi juga dari sisi produsen dan pedagang yang memperoleh manfaat berupa pengurangan biaya pengelolaan kas dan perbaikan informasi usaha.

Walaupun hasilnya signifikan, penelitian lanjutan perlu membedakan antara nilai transaksi, volume transaksi, jumlah instrumen beredar, dan saldo uang elektronik. Keempat indikator tersebut menggambarkan aspek yang berbeda. Nilai transaksi dapat meningkat karena harga atau ukuran transaksi lebih besar, sedangkan volume transaksi menunjukkan frekuensi penggunaan. Jumlah instrumen beredar belum tentu mencerminkan instrumen aktif, sementara saldo menggambarkan dana yang tersimpan. Pemilahan indikator akan memberikan pemahaman yang lebih tajam mengenai saluran pengaruh uang elektronik terhadap inflasi. Penggunaan model dinamis juga diperlukan untuk menangkap kemungkinan jeda waktu antara perubahan sistem pembayaran dan perubahan tingkat harga.

Perluasan pembayaran elektronik juga berpotensi memperkuat persaingan antarpenjual. Marketplace dan aplikasi pembayaran memudahkan konsumen membandingkan harga, memperoleh informasi promosi, dan beralih ke penjual lain dengan biaya yang rendah. Transparansi harga tersebut membatasi kemampuan pelaku usaha menaikkan harga secara berlebihan karena konsumen memiliki lebih banyak alternatif. Di sisi lain, pelaku usaha terdorong meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi agar tetap kompetitif. Mekanisme persaingan ini dapat menjadi salah satu saluran yang menghubungkan peningkatan penggunaan uang elektronik dengan penurunan tekanan inflasi, terutama pada barang dan jasa yang diperdagangkan melalui platform digital.

Namun, penggunaan uang elektronik juga dapat mendorong konsumsi impulsif karena proses pembayaran menjadi lebih mudah dan rasa kehilangan uang secara fisik berkurang. Program potongan harga, pengembalian dana, dan kemudahan transaksi dapat meningkatkan frekuensi pembelian. Apabila efek peningkatan permintaan lebih besar daripada manfaat efisiensi, uang elektronik justru berpotensi meningkatkan tekanan harga. Koefisien negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode sampel, manfaat efisiensi, substitusi alat pembayaran, dan transparansi diduga lebih dominan daripada efek peningkatan konsumsi. Hasil ini tetap perlu diuji pada periode yang lebih panjang dan pada kelompok barang yang berbeda.

Pengaruh Uang Kartal Terhadap Inflasi di Indonesia

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini melalui uji parsial (Uji-t), Nilai t_{hitung} ($1,720958$) < t_{tabel} ($2,03452$) dan nilai probabilitas ($0,0949$ > $0,05$) sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya secara parsial Uang Kartal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.

Menurut Irving Fisher (2014; 65) inflasi dipengaruhi oleh faktor lain seperti harga pangan bergejolak (volatile food), kebijakan harga yang diatur pemerintah (administered prices), serta kondisi global yang memengaruhi harga energi dan komoditas. Oleh karena itu, meskipun jumlah uang kartal mengalami peningkatan, perubahan tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pergerakan inflasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A. Mahendra (2016) yang menemukan bahwa jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor moneter berupa jumlah uang beredar, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti suku bunga dan nilai tukar.

Tidak signifikannya pengaruh uang kartal menunjukkan bahwa peningkatan uang tunai yang beredar selama periode penelitian belum cukup untuk menjelaskan perubahan inflasi setelah variabel lain dimasukkan ke dalam model. Uang kartal terutama berfungsi sebagai alat transaksi dan penyimpan nilai dalam bentuk yang paling likuid. Kenaikan kebutuhan uang tunai dapat terjadi karena bertambahnya aktivitas ekonomi, kebutuhan musiman, perluasan transaksi masyarakat, atau preferensi memegang kas. Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan uang kartal dapat menjadi akibat dari meningkatnya kegiatan ekonomi, bukan semata-mata penyebab kenaikan harga.

Temuan ini sejalan dengan gagasan bahwa hubungan antara jumlah uang dan tingkat harga tidak selalu bersifat langsung dalam jangka pendek. Menurut Mishkin (2016), transmisi moneter berlangsung melalui berbagai saluran, termasuk suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Uang kartal hanya merupakan salah satu komponen likuiditas dan porsinya tidak menggambarkan keseluruhan kondisi moneter. Perubahan uang kartal dapat diimbangi oleh perubahan simpanan masyarakat, instrumen pembayaran non-tunai, atau kebijakan bank sentral. Karena itu, pengaruh uang kartal terhadap inflasi dapat menjadi lemah ketika saluran moneter lain lebih dominan.

Kebutuhan uang kartal juga memiliki pola musiman. Pada periode tertentu, masyarakat cenderung menarik uang tunai lebih besar untuk memenuhi kebutuhan transaksi, perjalanan, pemberian tunai, atau aktivitas perdagangan. Kenaikan tersebut tidak selalu menimbulkan inflasi permanen karena sebagian uang dapat kembali ke sistem perbankan setelah periode kebutuhan berakhir. Apabila kenaikan uang kartal bersifat sementara dan disertai peningkatan pasokan barang, dampaknya terhadap tingkat harga menjadi terbatas. Hal ini membantu menjelaskan mengapa arah koefisien uang kartal positif, tetapi tidak signifikan secara statistik.

Selain itu, inflasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh komponen yang tidak secara langsung ditentukan oleh uang kartal. Harga pangan dapat berubah karena produksi, cuaca, distribusi, dan ketersediaan pasokan. Harga yang diatur pemerintah dapat berubah karena keputusan kebijakan, sedangkan harga barang impor dipengaruhi oleh nilai tukar dan kondisi global. Ketika faktor-faktor tersebut mendominasi pergerakan inflasi, variasi uang kartal menjadi kurang kuat dalam menjelaskan perubahan harga. Temuan Mahendra (2016) bahwa jumlah uang beredar tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap inflasi mendukung penjelasan bahwa inflasi merupakan fenomena multikausal.

Pengukuran uang kartal dalam nilai nominal juga perlu dipertimbangkan. Nilai nominal yang meningkat dari waktu ke waktu dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah penduduk, perluasan transaksi, dan perubahan kebutuhan kas. Tanpa penyesuaian terhadap ukuran ekonomi atau tingkat harga, pertumbuhan nominal belum tentu menunjukkan ekspansi likuiditas yang berlebihan. Penelitian lanjutan dapat menggunakan rasio uang kartal terhadap produk domestik bruto, uang kartal riil, atau pertumbuhan bulanan untuk memperoleh ukuran yang lebih sebanding dan mengurangi pengaruh tren jangka panjang.

Nilai probabilitas 0,0949 menunjukkan bahwa pengaruh uang kartal tidak signifikan pada tingkat lima persen, tetapi relatif lebih dekat dengan batas signifikansi dibandingkan variabel yang

benar-benar tidak memiliki pola hubungan. Hal ini mengisyaratkan bahwa uang kartal tetap relevan untuk diperhatikan, meskipun bukti pada sampel 36 bulan belum cukup kuat. Jumlah observasi yang terbatas dapat mengurangi kemampuan model mendeteksi pengaruh yang kecil. Dengan periode pengamatan yang lebih panjang, penggunaan data berfrekuensi tinggi, atau penambahan variabel kontrol, arah dan kekuatan hubungannya mungkin dapat diestimasi secara lebih akurat.

Implikasi kebijakan dari hasil ini bukanlah bahwa pengelolaan uang kartal dapat diabaikan. Bank sentral tetap perlu memastikan ketersediaan uang layak edar, distribusi kas yang efisien, dan keseimbangan antara kebutuhan tunai dengan pengembangan pembayaran digital. Pengelolaan yang baik mencegah kekurangan kas pada periode permintaan tinggi sekaligus mengurangi biaya pencetakan, distribusi, penyimpanan, dan pengamanan uang. Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan dengan mengamati uang kartal secara terpisah, tetapi memerlukan pemantauan likuiditas dan faktor penawaran secara menyeluruh.

Bagi masyarakat, keberadaan uang kartal tetap penting karena akses teknologi dan layanan keuangan belum sepenuhnya seragam. Transaksi tunai masih dibutuhkan oleh kelompok yang belum terbiasa menggunakan instrumen digital, usaha kecil, dan wilayah dengan keterbatasan jaringan. Oleh karena itu, transisi menuju pembayaran digital sebaiknya berlangsung secara bertahap dan tidak menghilangkan pilihan tunai. Keseimbangan antara tunai dan non-tunai akan membantu menjaga kelancaran transaksi sekaligus memastikan bahwa modernisasi sistem pembayaran tidak menimbulkan hambatan bagi kelompok tertentu.

Temuan tidak signifikan juga menekankan pentingnya membedakan antara korelasi dan mekanisme ekonomi. Kenaikan uang kartal dapat terjadi bersamaan dengan kenaikan inflasi, tetapi hubungan tersebut mungkin dipengaruhi variabel ketiga, misalnya peningkatan aktivitas konsumsi atau kebutuhan musiman. Sebaliknya, inflasi yang meningkat dapat mendorong masyarakat memegang nominal kas yang lebih besar untuk membeli jumlah barang yang sama. Kemungkinan hubungan dua arah tersebut perlu diuji menggunakan metode yang mampu menangani endogenitas, seperti model autoregresif, kausalitas Granger, atau pendekatan instrumen yang sesuai.

Permintaan uang kartal juga dipengaruhi oleh biaya peluang memegang uang. Ketika tingkat bunga meningkat, masyarakat memiliki insentif lebih besar menempatkan dana pada instrumen yang memberikan imbal hasil, sehingga proporsi kas dapat menurun. Sebaliknya, ketidakpastian atau keterbatasan akses layanan keuangan dapat meningkatkan preferensi memegang uang tunai. Karena penelitian belum memasukkan suku bunga dan indikator ketidakpastian, variasi uang kartal mungkin menangkap beberapa motif sekaligus. Penambahan variabel tersebut akan membantu memisahkan kebutuhan kas untuk transaksi, berjaga-jaga, dan penyimpanan nilai sebagaimana dijelaskan dalam teori permintaan uang.

Pengaruh uang kartal terhadap inflasi juga mungkin berbeda antarwilayah. Daerah perkotaan dengan penetrasi pembayaran digital tinggi memiliki ketergantungan lebih rendah pada uang tunai, sedangkan daerah yang akses internet dan perbankannya terbatas masih mengandalkan kas. Data nasional menggabungkan kondisi yang heterogen tersebut sehingga pengaruh yang kuat di suatu wilayah dapat tertutupi oleh pola berbeda di wilayah lain. Analisis panel antarprovinsi atau pengelompokan berdasarkan tingkat digitalisasi dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai apakah uang kartal lebih berpengaruh pada daerah tertentu.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi di Indonesia

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini melalui uji parsial (Uji-t), Nilai $-t_{hitung}$ $(-2,394740) < -t_{tabel} (-2,03452)$ dan nilai probabilitas $(0,0227 < 0,05)$ sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya secara parsial Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.

Menurut teori Keynesian yang dikemukakan oleh Mankiw (2016; 121), peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong inflasi melalui kenaikan permintaan agregat. Namun, pengeluaran pemerintah pada periode penelitian lebih banyak digunakan untuk belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur, subsidi, dan peningkatan layanan publik. Belanja tersebut mampu meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran distribusi sehingga membantu menekan inflasi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah justru berpengaruh negatif terhadap inflasi selama periode penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah dan Aryanto (2022) yang menemukan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Meskipun variabel yang digunakan berbeda, penelitian tersebut menunjukkan bahwa instrumen kebijakan ekonomi yang dikelola secara efektif oleh pemerintah dan otoritas moneter tidak selalu menyebabkan kenaikan inflasi sebagaimana yang dijelaskan dalam teori konvensional.

Koefisien negatif pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa komposisi dan efektivitas belanja lebih penting daripada besarnya belanja secara nominal. Dalam teori Keynesian, peningkatan belanja dapat menaikkan permintaan agregat dan menimbulkan tekanan harga apabila kapasitas produksi tidak mampu merespons. Namun, belanja yang diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur, distribusi, produksi, layanan publik, dan perlindungan sosial dapat bekerja melalui sisi penawaran. Apabila hambatan produksi dan distribusi berkurang, ketersediaan barang meningkat dan biaya logistik menurun, sehingga tekanan inflasi dapat diredam meskipun belanja pemerintah bertambah.

Pengeluaran pemerintah juga dapat menstabilkan harga melalui subsidi, bantuan, operasi pasar, dukungan transportasi, dan program yang menjaga ketersediaan komoditas penting. Kebijakan tersebut dapat mengurangi dampak kenaikan biaya terhadap konsumen dalam jangka pendek. Akan tetapi, pengaruhnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan keberlanjutan fiskal. Belanja yang tidak tepat sasaran dapat meningkatkan permintaan tanpa memperkuat produksi, sedangkan belanja yang produktif dapat memberikan manfaat ganda berupa pertumbuhan output dan stabilitas harga. Oleh karena itu, arah negatif dalam penelitian ini perlu dibaca sebagai karakter belanja pada periode sampel, bukan sebagai hukum bahwa setiap kenaikan pengeluaran selalu menurunkan inflasi.

Hasil ini dapat pula dijelaskan melalui peranan pengeluaran pemerintah dalam memperlancar distribusi. Inflasi tidak hanya muncul karena kelebihan permintaan, tetapi juga karena biaya dan hambatan pasokan. Pembangunan jalan, pelabuhan, sarana penyimpanan, jaringan informasi, dan layanan publik dapat mengurangi waktu serta biaya pengiriman. Efisiensi tersebut memperkecil perbedaan harga antarwilayah dan meningkatkan kemampuan produsen menjangkau pasar. Dalam jangka menengah, perbaikan kapasitas produksi dan konektivitas dapat menahan kenaikan harga barang dan jasa, terutama ketika permintaan masyarakat meningkat.

Dari sisi pengelolaan fiskal, waktu realisasi belanja juga memengaruhi dampaknya. Belanja yang menumpuk pada akhir periode dapat menciptakan lonjakan permintaan sementara dan mengurangi efektivitas program. Sebaliknya, realisasi yang lebih merata memberi kesempatan bagi penyedia barang dan jasa untuk menyesuaikan kapasitas. Penganggaran yang terencana, pengadaan yang transparan, dan evaluasi keluaran program dapat meningkatkan dampak belanja terhadap produktivitas. Rosen dan Gayer (2014) menekankan bahwa analisis keuangan publik tidak hanya melihat jumlah pengeluaran, tetapi juga efisiensi, distribusi manfaat, dan konsekuensi ekonominya.

Hubungan negatif dan signifikan juga memperlihatkan pentingnya koordinasi fiskal dengan kebijakan moneter. Ketika pemerintah memperkuat sisi penawaran melalui belanja produktif, bank sentral tidak harus menanggung seluruh beban stabilisasi harga melalui pengetatan moneter.

Sebaliknya, apabila belanja meningkatkan permintaan secara berlebihan, kebijakan moneter mungkin perlu merespons dengan suku bunga atau pengelolaan likuiditas. Sinergi kedua kebijakan memungkinkan inflasi dikendalikan tanpa mengorbankan pertumbuhan secara berlebihan. Temuan simultan penelitian ini mendukung pandangan bahwa kebijakan fiskal dan moneter sebaiknya dirancang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi.

Interpretasi koefisien pengeluaran pemerintah harus mempertimbangkan satuan data dan kemungkinan skala yang sangat besar. Karena variabel dinyatakan dalam miliar rupiah, perubahan satu satuan merupakan perubahan nominal yang kecil dibandingkan total belanja. Oleh sebab itu, fokus utama pembahasan sebaiknya berada pada arah hubungan, signifikansi, dan mekanisme ekonomi, bukan hanya angka koefisien secara langsung. Transformasi logaritma atau penggunaan pertumbuhan persentase pada penelitian selanjutnya dapat menghasilkan koefisien elastisitas yang lebih mudah diinterpretasikan.

Periode pengamatan yang relatif pendek juga dapat menangkap efek kebijakan yang khusus pada tahun tertentu. Sebagian belanja pemerintah memiliki dampak langsung, sedangkan belanja modal dan pembangunan kapasitas memerlukan waktu sebelum memengaruhi produksi dan harga. Model regresi contemporaneous dapat belum sepenuhnya menangkap jeda tersebut. Penelitian lanjutan dapat memasukkan lag pengeluaran pemerintah agar dapat membedakan dampak jangka pendek, ketika belanja meningkatkan permintaan, dan dampak jangka menengah, ketika belanja meningkatkan kapasitas produksi.

Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa kualitas belanja perlu menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi. Prioritas dapat diarahkan pada kegiatan yang memperkuat produksi pangan, mempermudah distribusi, mengurangi biaya logistik, meningkatkan ketahanan energi, dan menjaga layanan dasar. Program perlindungan sosial juga perlu dirancang tepat sasaran agar menjaga daya beli kelompok rentan tanpa menciptakan tekanan permintaan yang berlebihan. Evaluasi belanja harus mengukur keluaran nyata, seperti peningkatan kapasitas dan penurunan hambatan distribusi, bukan hanya tingkat penyerapan anggaran.

Temuan ini tidak meniadakan risiko inflasi dari ekspansi fiskal. Apabila pengeluaran dibiayai secara tidak berkelanjutan, terkonsentrasi pada belanja konsumtif, atau dilakukan ketika kapasitas ekonomi telah mendekati batas, tekanan harga dapat meningkat. Karena itu, disiplin fiskal, pemilihan program, dan koordinasi waktu pelaksanaan tetap diperlukan. Mankiw (2016) menjelaskan bahwa dampak kebijakan fiskal dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, respons pelaku ekonomi, dan kapasitas penawaran. Dengan demikian, hasil negatif pada periode 2022–2024 harus dipahami secara kontekstual.

Perbandingan dengan penelitian Amaliyah dan Aryanto (2022) perlu dilakukan secara proporsional karena variabel utama yang digunakan tidak sepenuhnya sama. Kesamaan arah dapat menggambarkan bahwa instrumen ekonomi yang dikelola secara efektif tidak selalu mendorong inflasi, tetapi mekanisme setiap variabel berbeda. Pengeluaran pemerintah bekerja melalui permintaan dan penawaran agregat, sementara jumlah uang beredar berkaitan dengan likuiditas dan transmisi moneter. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan belanja pemerintah bersama indikator pembayaran digital dan uang kartal dalam satu model.

Dampak pengeluaran pemerintah terhadap inflasi juga ditentukan oleh besarnya pengganda fiskal. Ketika terdapat kapasitas produksi yang belum digunakan, peningkatan belanja dapat menaikkan output dengan tekanan harga yang terbatas. Sebaliknya, ketika kapasitas telah mendekati penuh, tambahan permintaan lebih mudah diterjemahkan menjadi kenaikan harga. Oleh karena itu, arah negatif pada periode penelitian dapat menunjukkan bahwa belanja membantu mengaktifkan kapasitas, memperbaiki pasokan, atau mengatasi hambatan distribusi. Evaluasi kebijakan perlu mempertimbangkan posisi siklus ekonomi agar jumlah dan waktu belanja sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga penting karena banyak komoditas penyumbang inflasi dipengaruhi kondisi lokal. Belanja untuk jalan daerah, pasar, irigasi,

penyimpanan, transportasi, dan informasi harga dapat mengurangi gangguan pasokan di tingkat wilayah. Apabila program pusat tidak terhubung dengan kebutuhan daerah, dampak stabilisasi menjadi terbatas. Karena itu, pengendalian inflasi memerlukan sinkronisasi anggaran, data komoditas, dan jadwal pelaksanaan program antartingkat pemerintahan agar intervensi dilakukan sebelum tekanan harga membesar.

Dari sisi akuntabilitas, hubungan negatif akan lebih berkelanjutan apabila belanja dinilai berdasarkan manfaat ekonomi, bukan hanya realisasi nominal. Indikator seperti penurunan biaya distribusi, peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan pangan, dan ketepatan penerima bantuan perlu digunakan dalam evaluasi. Transparansi pengadaan dan pengawasan juga mencegah kebocoran yang mengurangi efektivitas anggaran. Dengan tata kelola yang baik, setiap rupiah belanja memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat penawaran dan stabilitas harga, sehingga hasil empiris penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang operasional.

Pengaruh Uang Elektronik, Uang Kartal dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian ini melalui hasil uji simultan (Uji-F), nilai F_{hitung} (21,36678) > F_{tabel} (2,90) dan nilai probabilitas ($0.000000 < 0,05$) sehingga diputuskan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, artinya Uang Elektronik, Uang Kartal dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, dkk (2022) yang menemukan bahwa variabel moneter dan fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi. Selain itu, penelitian Yanti dan Soebagiyo (2022) juga menunjukkan bahwa variabel-variabel moneter secara simultan berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

Pengaruh simultan ketiga variabel memperlihatkan bahwa inflasi tidak dapat dijelaskan hanya dari satu sisi. Uang elektronik mewakili perubahan teknologi dan perilaku pembayaran, uang kartal menggambarkan kebutuhan transaksi tunai, sedangkan pengeluaran pemerintah mencerminkan intervensi fiskal. Ketiganya bekerja melalui saluran yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam membentuk permintaan, efisiensi transaksi, likuiditas, dan kapasitas produksi. Nilai probabilitas uji F sebesar 0,000000 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan memiliki kemampuan menjelaskan variasi inflasi dalam sampel penelitian.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,667015 berarti 66,70 persen variasi inflasi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel yang digunakan. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan penjelasan yang cukup kuat untuk model dengan 36 observasi, tetapi juga menegaskan bahwa 33,30 persen variasi inflasi berasal dari faktor lain. Faktor tersebut dapat mencakup suku bunga, nilai tukar, harga energi, harga pangan, ekspektasi inflasi, gangguan pasokan, upah, output gap, dan kebijakan harga yang diatur pemerintah. Karena itu, hasil model tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa ketiga variabel merupakan satu-satunya penentu inflasi.

Hubungan antarvariabel dalam model juga perlu dipahami. Peningkatan uang elektronik dapat mengurangi kebutuhan uang kartal untuk sebagian transaksi, sehingga terjadi substitusi media pembayaran. Pada saat yang sama, pengeluaran pemerintah dapat disalurkan melalui sistem digital dan meningkatkan penggunaan instrumen non-tunai. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa perubahan salah satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya. Walaupun hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF terpusat di bawah 10, hubungan ekonomi tetap dapat terjadi dan menjadi bagian dari mekanisme yang menjelaskan inflasi.

Hasil asumsi klasik memberikan dukungan awal terhadap kelayakan model. Residual dinyatakan berdistribusi normal, tidak ditemukan masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi menghasilkan probabilitas di atas 0,05. Namun, nilai Durbin-Watson sebesar 0,468361 pada tabel regresi relatif rendah dan perlu dicermati bersama hasil uji Breusch-Godfrey. Pada data runtut waktu, korelasi residual dapat memengaruhi

ketepatan standar error. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan sebaiknya melakukan pemeriksaan tambahan, menggunakan standar error yang robust, atau menerapkan model dinamis apabila pola serial masih terlihat.

Penggunaan data bulanan sebanyak 36 observasi memberikan gambaran yang rinci dibandingkan data tahunan, tetapi periode tiga tahun tetap relatif singkat untuk analisis makroekonomi. Rentang tersebut mungkin belum mencakup satu siklus ekonomi penuh. Perubahan struktural, penyesuaian kebijakan, atau kejadian khusus pada awal periode dapat memberikan pengaruh besar terhadap hasil estimasi. Perluasan periode penelitian akan membantu menguji apakah arah hubungan tetap konsisten pada kondisi inflasi rendah, sedang, maupun tinggi.

Selain panjang periode, sifat stasioner data runtut waktu perlu menjadi perhatian. Variabel nominal seperti uang elektronik, uang kartal, dan pengeluaran pemerintah cenderung memiliki tren meningkat. Apabila data tidak stasioner, hubungan regresi dapat terlihat kuat meskipun berasal dari tren bersama. Penelitian ini telah melakukan asumsi klasik, tetapi pengembangan berikutnya dapat menambahkan uji akar unit, uji kointegrasi, dan pemilihan model seperti Error Correction Model atau Vector Autoregression sesuai karakter data. Langkah tersebut dapat membedakan hubungan jangka pendek dan jangka panjang.

Hasil penelitian juga mengisyaratkan kemungkinan hubungan dua arah. Penggunaan uang elektronik dapat memengaruhi inflasi melalui efisiensi transaksi, tetapi kondisi inflasi juga dapat memengaruhi nilai transaksi karena harga nominal barang berubah. Pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi inflasi, sementara inflasi dapat mendorong pemerintah menambah subsidi atau bantuan. Demikian pula, kebutuhan uang kartal dapat meningkat ketika harga naik. Kemungkinan endogenitas ini penting karena regresi linier berganda biasa mengasumsikan variabel penjelas tidak berkorelasi dengan error.

Dalam kerangka kebijakan, stabilitas harga memerlukan perpaduan kebijakan moneter, fiskal, sistem pembayaran, dan kebijakan sektor riil. Bank sentral dapat menjaga likuiditas dan ekspektasi, pemerintah dapat memperkuat pasokan serta distribusi, sedangkan pengembangan pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi. Koordinasi menjadi penting agar satu kebijakan tidak meniadakan manfaat kebijakan lain. Sebagai contoh, ekspansi belanja produktif akan lebih efektif apabila pasokan pembiayaan, sistem pembayaran, dan distribusi barang berjalan baik.

Temuan bahwa uang elektronik dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif tidak boleh diartikan sebagai anjuran meningkatkan keduanya tanpa batas. Dampak kebijakan bersifat tidak linear dan bergantung pada kondisi. Penggunaan uang elektronik yang berkembang tanpa keamanan dan literasi dapat meningkatkan risiko konsumen, sedangkan pengeluaran yang terlalu besar dapat menimbulkan tekanan permintaan dan risiko fiskal. Kebijakan perlu mencari tingkat, komposisi, dan tata kelola yang optimal agar manfaat efisiensi dan stabilisasi lebih besar daripada risikonya.

Bagi otoritas sistem pembayaran, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk terus meningkatkan infrastruktur digital, standardisasi, keamanan, dan akses. Bagi otoritas fiskal, hasilnya menekankan pentingnya belanja yang produktif serta mendukung pasokan. Bagi otoritas moneter, perubahan komposisi pembayaran tunai dan non-tunai perlu dimasukkan dalam pemantauan transmisi kebijakan. Perkembangan teknologi dapat mengubah permintaan uang, kecepatan peredaran, dan cara masyarakat merespons suku bunga, sehingga indikator moneter tradisional perlu dibaca bersama indikator digital.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggabungan variabel sistem pembayaran, uang tunai, dan fiskal untuk menjelaskan inflasi pada periode terbaru. Pendekatan tersebut memberikan gambaran bahwa modernisasi pembayaran tidak dapat dipisahkan dari struktur moneter dan kebijakan pemerintah. Hasil negatif uang elektronik menunjukkan bahwa digitalisasi dapat berjalan searah dengan stabilitas harga, sedangkan hasil pengeluaran pemerintah

menunjukkan pentingnya sisi penawaran. Tidak signifikannya uang kartal menegaskan bahwa perubahan media transaksi tunai tidak selalu cukup untuk menjelaskan dinamika harga.

Secara metodologis, hasil penelitian dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel kontrol, transformasi logaritma, dan komponen lag. Pengujian stabilitas parameter juga diperlukan untuk mengetahui apakah hubungan antarvariabel berubah dari tahun ke tahun. Model dapat dibandingkan dengan pendekatan ARDL, VAR, VECM, atau regresi dengan Newey-West standard errors. Selain itu, analisis dapat dipisahkan antara inflasi umum, inflasi inti, volatile food, dan administered prices agar mekanisme setiap variabel terlihat lebih jelas.

Penelitian selanjutnya juga dapat membedakan dampak uang elektronik berdasarkan penggunaan untuk transportasi, ritel, perdagangan daring, dan pembayaran pemerintah. Setiap jenis transaksi memiliki pola yang berbeda terhadap konsumsi dan efisiensi. Pengeluaran pemerintah dapat dipisahkan menjadi belanja pegawai, barang, modal, subsidi, dan bantuan sosial. Pemisahan tersebut akan membantu mengidentifikasi jenis transaksi digital dan jenis belanja yang paling konsisten mendukung stabilitas harga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa inflasi periode 2022–2024 merupakan hasil interaksi faktor moneter, fiskal, teknologi pembayaran, dan faktor lain di luar model. Penguatan pembayaran digital dan belanja produktif dapat mendukung stabilitas harga apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik. Pada saat yang sama, uang kartal tetap perlu dikelola untuk menjaga kelancaran transaksi dan inklusi. Kebijakan yang seimbang, berbasis data, dan terkoordinasi menjadi kunci agar transformasi ekonomi memberikan manfaat tanpa menimbulkan tekanan inflasi baru.

Secara praktis, hasil model dapat digunakan sebagai kerangka pemantauan, bukan sebagai rumus mekanis. Ketika transaksi elektronik meningkat dan inflasi menurun, otoritas perlu memeriksa apakah penurunan berasal dari efisiensi sistem pembayaran, membaiknya pasokan, atau kebijakan lain. Ketika uang kartal meningkat, perlu dibedakan apakah kenaikan bersifat musiman atau mencerminkan ekspansi permintaan yang lebih luas. Ketika belanja pemerintah bertambah, komposisi dan waktu realisasinya harus dianalisis. Pendekatan diagnosis tersebut mencegah pengambilan kesimpulan hanya berdasarkan arah koefisien.

Model penelitian juga dapat dikembangkan melalui analisis skenario. Pada skenario pertama, digitalisasi meningkat dan belanja diarahkan pada infrastruktur produktif; kombinasi ini berpotensi memperbaiki efisiensi permintaan dan penawaran. Pada skenario kedua, transaksi digital tumbuh karena promosi konsumsi sementara belanja bersifat konsumtif; tekanan harga dapat meningkat. Pada skenario ketiga, gangguan pasokan mendominasi sehingga perubahan alat pembayaran tidak banyak memengaruhi inflasi. Analisis skenario menegaskan bahwa pengaruh variabel bergantung pada konteks dan interaksi kebijakan.

Untuk memperkuat generalisasi, hasil perlu diuji menggunakan spesifikasi alternatif. Estimasi dapat dibandingkan antara data level, pertumbuhan, dan logaritma; antara inflasi bulanan dan tahunan; serta antara model tanpa dan dengan variabel kontrol. Uji sensitivitas terhadap periode sampel juga diperlukan, misalnya dengan mengeluarkan bulan yang memiliki perubahan inflasi ekstrem. Apabila arah dan signifikansi tetap konsisten pada berbagai spesifikasi, keyakinan terhadap temuan akan meningkat. Jika hasil berubah, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan bersifat sensitif dan perlu ditafsirkan lebih berhati-hati.

Hasil penelitian memiliki implikasi terhadap strategi komunikasi kebijakan. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan bahwa digitalisasi pembayaran, pengelolaan uang tunai, dan belanja pemerintah memiliki fungsi yang berbeda. Uang elektronik terutama meningkatkan efisiensi transaksi, uang kartal menjaga kelancaran pembayaran tunai, sedangkan anggaran pemerintah dapat memengaruhi permintaan dan kapasitas penawaran. Komunikasi yang jelas membantu membentuk ekspektasi inflasi yang lebih stabil karena masyarakat memahami tujuan dan batas setiap kebijakan. Ekspektasi yang terjaga penting agar pelaku usaha tidak menaikkan harga hanya karena memperkirakan tekanan inflasi yang belum tentu terjadi.

Bagi pelaku usaha, stabilitas inflasi yang didukung sistem pembayaran efisien memberikan kepastian dalam menetapkan harga, merencanakan persediaan, dan menentukan investasi. Pencatatan digital dapat digunakan untuk memantau perubahan biaya dan permintaan secara lebih cepat. Pemerintah dapat memanfaatkan data agregat yang tetap melindungi privasi untuk mendeteksi perubahan aktivitas ekonomi, sementara otoritas moneter dapat membaca pergeseran pola transaksi. Pemanfaatan data secara bertanggung jawab memungkinkan kebijakan merespons tekanan harga lebih dini tanpa menunggu indikator yang bersifat tertinggal.

Aspek inklusi tetap menjadi syarat penting. Kebijakan yang mendorong pembayaran digital perlu memastikan biaya transaksi terjangkau, layanan mudah digunakan, dan mekanisme penyelesaian masalah tersedia. Pada saat yang sama, uang kartal harus tetap tersedia bagi masyarakat yang memerlukan. Pendekatan ganda tersebut mencegah kesenjangan akses dan menjaga kelancaran ekonomi ketika terjadi gangguan jaringan atau sistem. Stabilitas harga akan lebih mudah dipertahankan apabila transformasi pembayaran tidak menghambat aktivitas kelompok usaha kecil dan rumah tangga yang masih bergantung pada tunai.

Dari sudut pandang pembangunan, pengeluaran pemerintah yang mendukung stabilitas harga sebaiknya sekaligus meningkatkan produktivitas jangka panjang. Belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan penguatan kelembagaan dapat memperbesar kapasitas ekonomi sehingga pertumbuhan permintaan tidak segera berubah menjadi inflasi. Todaro dan Smith (2015) menekankan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan, tetapi juga dari perbaikan kapasitas dan kesejahteraan. Karena itu, kebijakan fiskal yang produktif dapat menjadi jembatan antara tujuan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas harga.

Pada akhirnya, hasil empiris penelitian perlu diposisikan sebagai bukti kontekstual untuk periode 2022–2024. Koefisien yang diperoleh mencerminkan struktur data, pilihan variabel, dan metode estimasi yang digunakan. Temuan tersebut bermanfaat untuk menjelaskan pola dalam sampel, tetapi penerapannya pada periode lain memerlukan pengujian ulang. Sikap kehati-hatian ini penting agar rekomendasi kebijakan tidak berlebihan. Dengan pengembangan data, metode, serta pemisahan komponen inflasi dan belanja, penelitian berikutnya dapat memberikan dasar yang semakin kuat bagi koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sistem pembayaran di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda terhadap data bulanan periode 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa uang elektronik (e-money), uang kartal, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang berbeda terhadap inflasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang elektronik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penggunaan sistem pembayaran digital dapat mendukung efisiensi transaksi dan membantu menjaga stabilitas harga. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, menunjukkan bahwa belanja pemerintah yang produktif mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperlancar distribusi barang dan jasa sehingga dapat menekan laju inflasi. Sementara itu, uang kartal tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi selama periode penelitian.

Secara simultan, uang elektronik, uang kartal, dan pengeluaran pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa faktor moneter dan fiskal secara bersama-sama memiliki peran penting dalam menentukan dinamika inflasi. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,667 menunjukkan bahwa sebesar 66,70% variasi inflasi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya 33,30% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, pengendalian inflasi di Indonesia memerlukan sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang efektif, terutama melalui penguatan sistem pembayaran digital dan pengelolaan pengeluaran pemerintah yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- (2016). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Aswaja Pressindo.
- Affandi, Y & Iskandar, C.L. (2025). *Ekonomi dan Keuangan Digital : Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: BI Institute.
- Amaliyah, F., & Aryanto. (2022). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Boediono. (2018). *Ekonomi Moneter*. Jakarta: BPFE.
- BPS. (2020). *Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Firdaus, A. S., Reza, & Riyadi, R. (2022). Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan E-Views 10 (Edisi 2)*. Semarang: UNDIP.
- Halim. (2024). Pengaruh Nilai Transaksi Uang Elektronik, Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar dan Suku Bunga terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*
- Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbai, M. (2020). *Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EViews 10*. Jakarta: CV. AA Rizky.
- Hasan, I. (2018). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasoloan, J. (2014). *Ekonomi Moneter*. Jakarta: Deepublish.
- Igamo, A. M., & Falianty, T. A. (2018). Analisis dampak sistem pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(2), 236–252.
- Irianto, A. (2014). *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Kalbuadi, K., & Yanthi, M. D. Y. (2020). Pengaruh Peluncuran Sistem E-Money terhadap Jumlah Uang Beredar dan Inflasi. *Jurnal Cendekia Akuntansi*.
- Lintangsari, N. N., Hidayati, S., Purnomo, B. H., & Indrawati, S. M. (2018). Dampak instrumen pembayaran non-tunai terhadap perekonomian dan kebijakan moneter di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45–60.
- Mahendra, A. (2016). Analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga SBI, nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 1–15.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics (9 ed.)*. Worth Publishers.
- Mishkin, F. S. (2016). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson Education.
- Rahmadani, D., & Hilmawan, R. (2024). Analisis pengaruh volume transaksi uang elektronik terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 11(1), 23–38.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). *Public Finance (10 ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Sahir, syafrida H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2017). *Economics*. McGraw-Hill Education.
- Sinambela, L. P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Cetakan Kesatu)*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development (12 ed.)*. Pearson Education.
- UNDP. (2019). *Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today*. UNDP.
- Website Badan Pusat Statistik Indonesia <https://bps.go.id>
- Website Bank Indonesia <https://bi.go.id>
- Yanti, Y. W. T. F., & Soebagiyo, D. (2022). Analisis Pengaruh Variabel Moneter terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*.